



WHITE PAPER

Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia

**Disusun oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia**



DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	3
2. INFORMASI OGP DAN ASTA CITA	5
2.1. Tentang OGP	5
2.2. Peran dan Capaian OGP Indonesia.....	6
2.3. OGP dan 8 Misi Asta Cita	8
2.4. OGP dan Asta Cita <i>Quick Wins</i> (program cepat dan baik)	10
3. INSPIRASI OGP	14
3.1. Inspirasi Dalam Negeri	14
3.1.1. Kementerian Sosial bekerjasama dengan Perkumpulan Medialink: Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan (2021-2022)	14
3.1.2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat: Penguatan Forum Yasinan sebagai media konsultasi, evaluasi, komplain, dan pemecahan masalah bersama (2021-2023)	15
3.2. Inspirasi Luar Negeri	15
3.2.1. Inspirasi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Korea Selatan	15
3.2.2. Inspirasi dari Filipina	16
4. MELAKSANAKAN OGP BERSAMA ASTA CITA	17
4.1. Peta Jalan dan Rencana aksi OGP Indonesia	17
4.2. Panitia pelaksana.....	18
4.2.1. Regulasi.....	18
4.2.2. Kelembagaan	20
4.2.3. Akuntabilitas	21
4.2.4. Pendanaan Sekretariat dan Rencana Aksi	22
5. Rekomendasi Kritis.....	25

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2024 lalu, Indonesia mendapatkan penghargaan dari komunitas internasional di saat indikator-indikator pembangunan nasional mengalami penurunan. Penghargaan tersebut berasal dari inisiatif global Kemitraan Pemerintah Terbuka (*Open Government Partnership/OGP*). OGP adalah kemitraan negara-negara untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif. Lebih tepatnya, penghargaan tersebut diberikan di era Presiden Joko Widodo berkat keterlibatan Indonesia sebagai negara anggota dalam OGP serta atas komitmen besar dalam mengimplementasikan inisiatif keterbukaan pemerintah. Dampak yang dihasilkan dari inisiatif tersebut berhasil membuat OGP memberikan anugerah Juara 1 kepada Indonesia pada ajang penghargaan OGP Awards 2024 di Tallinn, Estonia.

Saat ini, keterlibatan Indonesia dalam OGP sudah berkembang menjadi inisiatif Keterbukaan Pemerintah Indonesia (*Open Government Indonesia/OGI*), dimana pemerintah dan masyarakat sipil secara kolaboratif bekerja bersama untuk mewujudkan komitmen perubahan di berbagai sektor. Inisiatif tersebut menjadi modalitas yang baik untuk dilanjutkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada masa pemerintahan selanjutnya. Di saat yang sama, berkaca pada keberhasilan sebelumnya, keterlibatan Indonesia dalam OGP dan inisiatif Keterbukaan Pemerintah Indonesia pada dasarnya merupakan pendekatan yang strategis bagi presiden terpilih untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya sebagaimana tertuang dalam dokumen 8 Misi (Asta Cita).

Asta Cita memuat sasaran strategis yang hendak dicapai melalui program-program kerja pemerintah. Dengan memadukan Asta Cita dengan prinsip-prinsip dalam OGP dan OGI, penyelenggaraan program-program tersebut akan dapat dicapai secara optimal. Dalam hal ini, prinsip-prinsip dalam OGP dan OGI yang dimaksud yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusif. Selain itu, keterbukaan pemerintah juga identik dengan konsep kolaborasi atau ko-kreasi dimana pemerintah dan masyarakat sipil, alih-alih berseberangan, saling bekerja sama sejak dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, sehingga terbangun rasa memiliki dan kepedulian dari publik untuk mendukung keberhasilan dari program-program tersebut.

Contoh serupa juga dapat ditemukan pada periode sebelumnya, dimana implementasi atas komitmen keterbukaan pemerintah berhasil membawa Indonesia mendapatkan penghargaan **Juara 2 OGP Impact Awards Tahun 2021** pada OGP Global Summit di Korea Selatan. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Indonesia dalam membentuk portal keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan di sektor ekonomi. Portal tersebut berhasil dalam membuka akses bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah untuk

terlibat di pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah.¹ Keberhasilan lainnya yang juga dapat dijadikan contoh, yaitu, pada saat Indonesia dianugerahi **Juara 1 OGP Awards Tahun 2023** dalam OGP Global Summit di Estonia atas komitmen implementasi keterbukaan pemerintah di bidang perluasan bantuan hukum bagi individu dan kelompok rentan.² Komitmen ini pada akhirnya berkontribusi terhadap pemenuhan akses keadilan dan membantu masyarakat miskin/tidak mampu ketika mengalami permasalahan hukum.

1.2. Tujuan

Sejak 2010, Indonesia sudah terlibat dalam forum OGP internasional sebagai gerakan inovasi global dalam mendorong transparansi pemerintah suatu negara. Pada 2011, Indonesia bersama Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina mendirikan OGP.

Hingga 2024, keterlibatan ini banyak menghasilkan capaian positif bagi pemerintah Indonesia yang semakin transparan, bahkan menginspirasi pemerintah negara-negara lain. Tujuan forum multilateral ini adalah menciptakan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan akuntabel. Segala capaian dan kuatnya komitmen Indonesia terhadap open government bukan hanya mendapat apresiasi positif dari banyak negara tapi juga ditempatkan sebagai *best practices*. Untuk Indonesia, OGP setidaknya dapat mengakselerasi kualitas layanan publik yang akan memberikan manfaat bagi upaya keluar dari *middle income trap*, kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Dokumen ini disusun dengan tujuan menjadi usulan implementasi OGP sebagai upaya untuk mengakselerasi program prioritas pemerintah baru termasuk Asta Cita dengan disertai partisipasi warga yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dokumen ini disusun secara sederhana agar dapat menjadi referensi praktis bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah secara cepat.

Meskipun dokumen ini disusun secara ringkas, namun penyusunan dokumen telah mempertimbangkan ragam kondisi dan kebutuhan kementerian/lembaga, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak menciptakan suatu *blue print* yang kaku (*one size fits all*), namun bersifat menjadi menu-menu pilihan.

¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) memperoleh Juara 2 OGP Impact Award melalui komitmen portal keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa. <https://ogi.bappenas.go.id/perjalanan>.

² Diakses melalui: <https://www.bappenas.go.id/berita/indonesia-raih-ogp-awards-terkait-perlindungan-hukum-individu-dan-kelompok-rentan-EZXVf>.

2. INFORMASI OGP DAN ASTA CITA

2.1. Tentang OGP

Kemitraan Pemerintah Terbuka (OGP) diluncurkan pada 20 September 2011 dalam pertemuan Sidang Umum PBB di New York dengan (8) delapan negara pendiri, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina mendirikan OGP sebagai inisiatif multilateral untuk demokrasi dimana tokoh perubahan pemerintah dan masyarakat sipil mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan akuntabel dengan mendorong berbagai inovasi. Saat ini 75 negara dan 150 yurisdiksi lokal telah bergabung dalam keanggotaan OGP. Indonesia sendiri saat ini menjadi salah satu anggota *steering committee* OGP global.³

OGP merupakan salah satu instrumen yang mampu mengakselerasi program prioritas pemerintah. Mengingat OGP telah menyediakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan utama bagi negara anggotanya. Prinsip tersebut meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusi, dan inovasi yang dimana hal ini berlaku bagi setiap lembaga-lembaga pemerintah di semua tingkatan, termasuk terhadap Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan lainnya. Kelima nilai tersebut merupakan standar/pedoman dalam tahapan penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintah Indonesia baik dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Berikut ini adalah penjabaran terhadap prinsip utama OGP, yaitu:⁴

1. **Transparansi:** Informasi mengenai proses, kegiatan, keputusan dan hasil OGP harus mudah diakses oleh pemangku kepentingan yang berkepentingan. Secara proaktif mempublikasikan dan menyebarkan informasi dalam format yang paling relevan dan melalui cara yang paling tepat sepanjang siklus rencana aksi dan memberikan perkembangan terkini secara berkala mengenai pengembangan dan implementasi komitmen.
2. **Partisipasi inklusif:** Memungkinkan keberagaman suara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses OGP, mengidentifikasi prioritas, dan mengusulkan solusi. melakukan penjangkauan kepada kelompok minoritas atau kelompok yang secara tradisional kurang terwakili dan memastikan akses ke informasi mengenai peluang untuk berpartisipasi dan memberikan masukan.
3. **Akuntabilitas:** Memberikan informasi yang jelas tentang hasil proses konsultasi dan hasil implementasi komitmen. Pemerintah harus menjelaskan, misalnya, mengapa prioritas pemangku kepentingan tertentu tidak dimasukkan serta alasan terjadinya perubahan atau penundaan selama implementasi komitmen.

³ Diakses melalui: <https://www.opengovpartnership.org/about/who-we-are/>

⁴ Diakses melalui: <https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/>

4. Inovasi dan ambisi: Berusaha melampaui persyaratan minimum yang diuraikan di sini dan berinovasi dalam cara mengembangkan, menciptakan bersama, dan menerapkan reformasi pemerintahan terbuka yang semakin ambisius dan transformatif melalui proses yang sangat transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Persyaratan minimum harus dilihat sebagai titik awal, bukan tujuan.

OGP sebagai gerakan global didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah yang semakin terbuka dan informasi yang mudah diakses akan mewujudkan peningkatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. OGP mewujudkan kemitraan yang intensif antara pemerintah dan masyarakat sipil yang secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif, memperluas akses dan keterbukaan informasi serta meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi. Gerakan OGP dengan pendekatan yang kolaboratif akan mampu menjawab tantangan secara bersama dan mampu menciptakan tujuan bersama antara pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah.

Ciri khas utama dalam OGP adalah mekanisme kolaborasi antara aktor pemerintah dengan aktor non pemerintah yang disebut dengan Ko-Kreasi. **Ko-kreasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan meningkatkan kualitas kebijakan publik dan pelayanan publik yang lebih inklusif dan aksesibel.** Penyusunan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang partisipatif mampu meningkatkan kebijakan pemerintah yang lebih berkualitas dengan menyesuaikan tujuan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan warga⁵. **Oleh karena itu, ko-kreasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan inti dari gerakan OGP.**

Meski pelaksanaan komitmen dalam OGP mewajibkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah, akan tetapi tanggung jawab atas keberhasilan komitmen tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan pemerintah nasional dan daerah sebagai pemegang otoritas dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, termasuk pendanaan, penerapan inovasi dan teknologi dalam pelaksanaan komitmen.

2.2. Peran dan Capaian OGP Indonesia

Indonesia secara resmi Indonesia bergabung menjadi anggota OGP sejak tahun 2014 dengan menerbitkan Keppres Nomor 13/2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada OGP. Pemerintah Indonesia memegang peranan penting sebagai inisiator OGP, peran penting ini yaitu menjadi;

- *Co-Chair* dalam keanggotaan *Steering Committee (SC)* OGP di tahun 2013

⁵ Partisipasi warga dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah yang berbasis bukti. Lihat selanjutnya di Knowledge Sector Initiatives (Indonesia), diakses melalui <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/10/ksi-1603094475.pdf>.

- Anggota SC OGP periode 2015-2018
- Anggota SC OGP periode 2019-2022
- Anggota SC OGP periode 2022-2025

Peran Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun perwakilan OMS Indonesia juga memiliki sumbangsih besar dalam inisiatif ini, karena salah satu prasyarat OGP mengharuskan kemitraan antara pemerintah dengan OMS dengan posisi yang setara. Peran penting OMS Indonesia di OGP diantaranya

- Menjadi SC OGP CSO global pada periode 2013 - 2015 dan 2015 - 2017
- Menjadi wakil Global Envoy OGP global

Sejumlah penghargaan *open government* telah didapat oleh Kementerian/Lembaga dan OMS Indonesia. Pada 2023, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) meraih penghargaan OGP Awards 2023 di Estonia. Sebelumnya pada tahun 2021, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memperoleh Juara 2 OGP Impact Award. Pada 2016, *Platform* API Pemilu inisiatif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memenangkan Silver Award 2016 dalam penganugerahan OGP. Pada 2015, Gerakan Inisiatif Pencerah Nusantara meraih peringkat kedua penganugerahan OGP serta Indonesia terpilih sebagai anggota *Steering Committee* OGP Periode 2015-2018.⁶

Berkaca dari perjalanan lebih dari satu dekade sejak diluncurkan pada tahun 2011, OGP Indonesia telah menunjukkan demonstrasi dan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan rangkaian Rencana Aksi Nasional (RAN) OGP Indonesia, yang terus berkembang dari 3 (tiga) tema dengan 12 komitmen aksi di RAN Pertama, menjadi 5 (lima) tema dengan 15 komitmen aksi pada RAN Ketujuh, yang meliputi:

Tabel 1: Pelaksanaan RAN OGI I - VII

RAN OGI	Tahun	Fokus Utama
RAN I	2012 - 2013	1. Peningkatan layanan publik; 2. Perbaikan integritas institusi pelayanan public; dan 3. Efektivitas pengelolaan sumber daya publik.
RAN II	2013 - 2014	1. Peningkatan layanan dasar publik; 2. Perbaikan tata kelola layanan bisnis dan investasi; serta; 3. Transparansi dan akuntabilitas manajemen anggaran publik.

⁶ Diakses melalui: <https://ogi.bappenas.go.id/en/perjalanan>

RAN OGI	Tahun	Fokus Utama
RAN III	2014 - 2015	1. Penguatan infrastruktur kelembagaan dalam mendorong transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan publik; 2. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area layanan dasar masyarakat; 3. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area rawan korupsi; 4. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area yang menjadi perhatian utama publik.
RAN IV	2016 - 2017	1. Peningkatan partisipasi publik; 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penguatan pelayanan publik; 3. Penguatan keterbukaan informasi publik; 4. Penguatan tata Kelola data.
RAN V	2018 - 2020	1. Partisipasi publik; 2. Reformasi birokrasi; 3. Akses informasi publik; 4. Tata kelola data; 5. Inovasi pelayanan publik.
RAN VI	2021 - 2022	Pemulihan Pasca-Pandemi COVID-19 dengan fokus utama: 1. Penguatan pelayanan publik; 2. Antikorupsi; 3. Transparansi fiskal; 4. Akses terhadap keadilan; 5. Partisipasi masyarakat; 6. Kebijakan publik berspektif gender.
RAN VII	2023 - 2024	1. Anti-Korupsi dan Anggaran; 2. Ruang Kewargaan dan Demokrasi; 3. Pelayanan Publik yang Inklusif; 4. Akses terhadap Keadilan; 5. Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial; 6. Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan penjelasan di atas OGP telah banyak membantu pencapaian kualitas dan inovasi pelayanan publik. Beberapa hasil nyata pencapaian OGP di Indonesia antara

lain, lahirnya inisiatif pengaduan masyarakat SP4N-LAPOR!, Satu Peta, Satu Data Indonesia, reformasi pengadaan barang dan jasa, mempercepat pelaksanaan *Extractive Industries Transparency Initiatives* (EITI) Indonesia, bantuan hukum untuk masyarakat, maupun inisiatif di tingkat daerah, serta berbagai penghargaan dan pengakuan di tingkat nasional dan internasional.

2.3. OGP dan 8 Misi Asta Cita

Mencermati prinsip-prinsip OGP Indonesia, terdapat berbagai peluang yang dapat didorong oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya sebagaimana tertuang dalam 8 Misi (Asta Cita). Peluang yang dimaksud menjadi penting untuk diupayakan mengingat prinsip-prinsip OGP Indonesia pada dasarnya juga merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Delapan (8) Misi Asta Cita tersebut yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi-Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keselarsan OGP dan 8 misi “Asta Cita” diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-20245, sekaligus melengkapi prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan tujuan–tujuan yang berkaitan dengan filosofi bangsa, sosial politik, pendidikan dan kesehatan, peningkatan SDM, lingkungan,

energi bersih, serta upaya menangani perubahan iklim. Adapun keterkaitan prinsip-prinsip OGP dengan Asta Cita diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2: Prinsip OGP dalam 8 (delapan) Misi Asta Cita Prabowo Gibran

Prinsip OGP	8 Misi Asta Cita
1. Transparansi	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 4. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 5. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
2. Partisipasi dan inklusif	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 5. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 6. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Prinsip OGP	8 Misi Asta Cita
	7. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
3. Akuntabilitas	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 5. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 6. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
4. Inovasi dan ambisi	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 4. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 5. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. 6. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.4. OGP dan Asta Cita *Quick Wins* (Program Cepat dan Baik)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dalam Pemilihan Presiden 2024 berdasarkan hasil rapat pleno penetapan perolehan suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, pada Rabu 20 Maret 2024.

Pasangan ini mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 8 (delapan) Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menyusun sinkronisasi Asta Cita dari visi misi kedalam program prioritas dan program hasil tercepat baik (*quick wins*) dengan uraian sebagai berikut.

Gambar 1: Asta Cita dan Program Prioritas Prabowo-Gibran

8 MISI (ASTA CITTA)	17 PROGRAM PRIORITAS	8 PROGRAM HASIL TERCEPAT BAIK
- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. - Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Catatan: Di Dalam 8 Asta Cita terdapat 320 program kerja	- Mencapai swasembada pangan, energi dan air. - Penyempurnaan sistem pemerintahan negara. - Reformasi politik, hukum dan birokrasi. - Pencegahan dan pemberantasan korupsi. - Pemberantasan kemiskinan. - Pencegahan dan pemberantasan narkoba. - Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. - Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. - Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. - Penguatan kesetaraan gender dan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. - Menjamin pelestarian lingkungan hidup. - Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. - Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. - Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya. - Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. - Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. - Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	- Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil - Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional - Melanjutkan program KIS, KIP, KS, prakerja, PKH Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi - Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara - Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) - Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Visi dan Misi Prabowo - Gobran tersebut telah diselaraskan dengan cita-cita tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dimana diharapkan tercapai target:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emissions (nol emisi GRK).

Dalam 5 (lima) tahun mendatang, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang akan dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diantaranya:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC 50% dalam (5) lima tahun dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu- kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Meningkatkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sebagaimana disebutkan diatas, OGP merupakan salah satu instrumen “*trigger mechanism*” yang mampu mengakselerasi program prioritas pemerintah, akan sangat membantu pencapaian Misi Asta Cita dan Program *Quick Wins* pemerintahan mendatang. Dengan standar dan prinsip OGP seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusi, dan inovasi serta mekanisme Ko-Kreasi antara aktor pemerintah dengan aktor non pemerintah, akan mempercepat sekaligus meningkatkan kualitas target Misi Asta Cita dan Program *Quick Wins* yang lebih inklusif dan aksesibel.

Dalam konteks **Program *Quick Wins*** pemerintahan mendatang, **OGP juga telah memiliki berbagai pengalaman dan pembelajaran baik dari pelaksanaan dan pencapaian sejumlah rencana aksi (renaksi)** Kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui renaksi Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (2018-2020) telah menghasilkan integrasi data ketersediaan tempat tidur di RS Rujukan Nasional dan Provinsi dalam aplikasi RS Online. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga melakukan sosialisasi dan penyusunan juknis RS Online kepada dinas kesehatan Provinsi (**Program *Quick Wins* No. 2**)

Selain itu, kolaborasi Kementerian Sosial dan MediaLink melalui renaksi Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan (2018-2020), telah menghasilkan ketersediaan portal informasi terkait Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diakses melalui <https://dtks.kemensos.go.id> oleh publik. Terbangunnya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) guna memudahkan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial. Melalui renaksi Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-Program Kesejahteraan (2020-2022), kolaborasi Kementerian Sosial dan MediaLink berlanjut menghasilkan Integrasi DTKS dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sekaligus mengembangkan platform Usul-Sanggah untuk memastikan keakuratan data dari setiap DTKS (**Program Quick Wins No. 5**).

Sejumlah Kementerian/Lembaga diantaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, berkolaborasi dengan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), diantaranya Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Transparency International (TI) Indonesia mendorong pelaksanaan keterbukaan dan pemanfaatan data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership/BO*) melalui rangkaian renaksi pada 2018-2020, 2020-2022, hingga 2023-2024. Pemerintah Indonesia telah membangun dan membuka basis data BO melalui portal data <https://bo.ahu.go.id/>. Keterbukaan dan pemanfaatan data BO dapat membantu pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana pengelakan pajak, korupsi, terorisme dan pencucian uang (**Asta Cita Nomor 7**) sekaligus memperkuat sistem perpajakan di Indonesia yang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak (**Program Quick Wins No. 8**).

Kerjasama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Wahana Visi Indonesia pada renaksi 2018-2020, 2020-2022, dan 2023-2024 menghasilkan capaian yang maksimal dalam pemenuhan layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Model-model akuntabilitas sosial berupa pemantauan standar, kartu penilaian serta dialog partisipatif - yang merupakan prinsip OGP- atas layanan posyandu, pemberian makanan bergizi, air bersih, dan literasi di daerah tertinggal terbukti menjadi alat yang baik mendorong kualitas layanan. Desa-desanya yang didampingi Wahana Visi Indonesia menunjukkan serapan lebih baik atas anggaran desa serta peningkatan kualitas dalam hal layanan posyandu dan pemberian makanan tambahan bergizi untuk anak. Laporan Bank Dunia menyebutkan proses akuntabilitas sosial itu bukan saja meningkatkan layanan kesehatan tetapi juga meningkatkan partisipasi secara bermakna warga, secara khusus kelompok perempuan, menjadi berdaya.⁷ Lebih lanjut disebutkan bahwa peningkatan keterlibatan warga dalam proses-proses kebijakan membantu pembangunan pemerintah daerah (**Program Quick Wins No. 1, 2, 3 dan 7**).

⁷ Westthorp, G, et al, 2019. Citizen Voice and Action for Government Accountability and Improved Services : Maternal, Newborn, Infant and Child Health Services, Final Evaluation, Wahani Visi, World Bank, January.

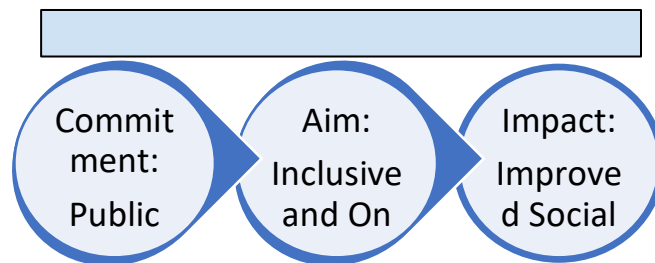
3. INSPIRASI OGP

OGP memiliki dua skema keanggotaan yaitu anggota dari negara dan anggota dari pemerintah daerah (OGP Local/Subnational). Anggota OGP yang dinilai memiliki praktik baik dalam menjalankan komitmennya berpeluang untuk didokumentasikan, sehingga *Lesson learned* yang dimiliki dapat menjadi inspirasi bagi anggota OGP lainnya. Selanjutnya, OGP juga secara periodik mengadakan ajang penghargaan (*OGP Awards*) bagi negara yang berhasil menjalankan inisiatif keterbukaan pemerintah melalui kolaborasi dengan warganya, serta berhasil memberikan dampak positif terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain *OGP Awards* yang penilaiannya dilakukan oleh tim juri OGP, penilaian terhadap pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah juga dilakukan oleh tim konsultan independen melalui mekanisme *Independent Report Mechanism* (IRM).⁸ Penilaian IRM dilakukan terhadap seluruh inisiatif keterbukaan pemerintah dan dampaknya terhadap penanganan masalah yang dihadapi warganya.

Indonesia sebagai anggota OGP memiliki beberapa praktik baik karena dinilai berhasil dalam menjalankan komitmennya dan memiliki dampak yang luas terhadap publik. Anggota OGP Local yang berasal dari Indonesia pun diakui oleh dunia internasional sebagai inovasi yang perlu direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut. Berikut ini adalah beberapa contoh komitmen keterbukaan pemerintah yang dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintahan Indonesia kedepan:

3.1. Inspirasi Dalam Negeri

3.1.1. Kementerian Sosial bekerjasama dengan Perkumpulan Medialink: Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan (2021-2022)



Sebagai keberlanjutan dari komitmen sebelumnya “Akuntabilitas Data PBI”, Kementerian Sosial dan Perkumpulan Medialink berkomitmen untuk mengimplementasikan “Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-

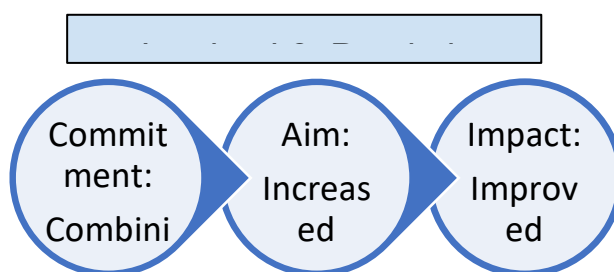
⁸ Penilaian keberhasilan komitmen bagi anggota OGP yang menjalankan Rencana Aksi Nasionalnya. Assessment ini dilakukan oleh Konsultan Independen yang ditunjuk oleh OGP Support Unit, dengan mekanisme yang sangat selektif.

program Kesejahteraan. Tujuan komitmen ini untuk mengurangi kesenjangan data, dimana komitmen ini akan menambahkan data dari program kesejahteraan sosial besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ke dalam platform SIKS-NG, dan mengintegrasikan data tersebut dengan data PBI.

PKH menjangkau 10 juta rumah tangga pada tahun 2018 dan BPNT menjangkau 15,6 juta rumah tangga pada tahun 2019, menunjukkan bahwa komitmen ini dapat berdampak pada populasi penerima manfaat kesejahteraan sosial yang tersebar luas. Komitmen ini dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah, masyarakat sipil, dan penerima manfaat untuk memperkuat penyediaan kesejahteraan sosial dengan mengkoordinasikan data yang terfragmentasi, memungkinkan analisis kesenjangan penyediaan, mengurangi peluang kesalahan alokasi dana, dan memfasilitasi kemampuan penerima manfaat untuk menentukan kelayakan mereka atas layanan.

IRM menilai bahwa komitmen ini memiliki potensi yang berdampak luas terhadap pemenuhan hak publik (substansial) dan sesuai dengan prinsip-prinsip OGP. Komitmen ini memberikan perbaikan besar terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kesejahteraan sosial. Hal ini mengikuti rekomendasi IRM untuk mengembangkan desain yang berpusat pada pengguna, memastikan adanya umpan balik, dan mendorong keterlibatan masyarakat. KPK juga memuji perbaikan DTKS dan pemanfaatan database untuk upaya pemberantasan korupsi yang berfokus pada dana kesejahteraan⁹.

3.1.2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat: Penguatan Forum Yasinan sebagai media konsultasi, evaluasi, komplain, dan pemecahan masalah bersama (2021-2023)



Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadi anggota Local OGP pada tahun 2021 dengan berkomitmen menjalankan enam komitmen selama 2021-2023. Komitmen Penguatan Forum Yasinan mendapatkan penghargaan sebagai The First Winner World Innovation Spotlight Award Open Government Partnership (OGP) 2021 Korea Selatan

⁹ Diakses melalui: <https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/ID0121/>

pada 15 Desember 2021. Komitmen ini dinilai memiliki inovasi dalam mengembangkan partisipasi publik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga.

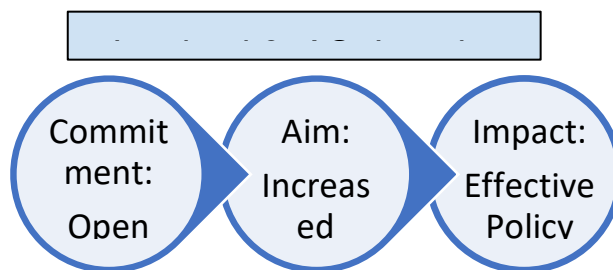
Forum Yasinan menjadi salah satu media untuk bertukar pikiran atas masalah-masalah yang dihadapi warga setiap malam Jumat. Forum ini dihadiri Kepala Daerah, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, anggota DPRD, dan warga dari semua kalangan. Dalam setiap pertemuan berikutnya akan dicek kembali dan memastikan masalah yang disampaikan warga pada pertemuan berikutnya sudah terselesaikan.

Hasilnya, Sumbawa Barat diganjar dengan capaian-capaian yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah publik seperti penyelesaian Sanitasi Sosial Berbasis Masyarakat (STBM) dengan kategori paripurna, artinya seratus persen tidak ada masalah dalam sanitasi¹⁰. Begitu juga Angka Penurunan Stunting terbaik di Provinsi NTB pada tahun 2023¹¹. Sumbawa Barat dinilai sebagai kabupaten yang Progresif Dalam Pembangunan Komunikasi Publik¹². KPK juga memberikan penghargaan atas prestasinya sebagai pemerintah dengan capaian tertinggi perolehan skor *Monitoring Center for Prevention* (MCP) 2023.¹³

Keberhasilan tersebut, salah satunya karena komitmen yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai anggota OGP Local yang mengimplementasikan prinsip-prinsip OGP: transparansi, partisipasi yang inklusif, akuntabilitas dan inovasi dalam pelayanan publik.

3.2. Inspirasi Luar Negeri

3.2.1. Inspirasi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Korea Selatan



Inspirasi lain dapat juga dapat diperoleh dari komitmen Rencana Aksi Nasional OGP Amerika Serikat 2013-2015 “*Open Data Public*” Komitmen ini menjawab kebutuhan

¹⁰ Diakses melalui : <https://prokopim.sumbawabarakab.go.id/satu-satunya-di-ntb-bupati-sumbawa-barat-terima-dua-penghargaan-secara-bersamaan-dari-dua-kementerian/>

¹¹ Diakses melalui: <https://prokopim.sumbawabarakab.go.id/pemkab-sumbawa-barat-terima-penghargaan-penurunan-angka-stunting-terbaik-se-ntb-tahun-2023/>

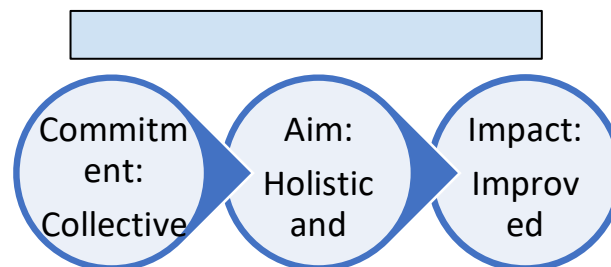
¹² Diakses melalui: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/792893/kabupaten-sumbawa-barat-raih-penghargaan-sebagai-kabupaten-progresif-membangun-komunikasi-publik>

¹³ Diakses melalui: <https://www.antaraneews.com/berita/3824397/bupati-sumbawa-barat-dapat-penghargaan-mcp-kpk>

publik mengenai akuntabilitas pemenuhan pelayanan hak dasar di Amerika Serikat. Amerika telah menjalankan open data publik didahului integrasi data dengan memastikan akurasi “*National Integration Data System*”. Begitu juga dengan contoh yang dijalankan oleh Republik Korea Selatan dalam komitmen Rencana Aksi OGP tahun 2018-2020 dengan komitmen “*Open National Priority Data*”¹⁴ dan Inggris dengan komitmennya pada “*Transparency in the Health Sector*” di tahun 2021-2023¹⁵. Inisiatif keterbukaan dan integrasi data ini memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan feedback untuk menjamin kualitas data. Data ini kemudian menjadi rujukan utama dalam memastikan semua program-program kesejahteraan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, dan tepat waktu. Di samping itu, sistem pengamanan datanya juga sangat terlindungi dan meminimalisir kebocoran¹⁶.

Komitmen OGP Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan tersebut layak menjadi contoh dalam mengakselerasi program prioritas Pemerintah ke depan yang dijanjikan, khususnya pada *quick win* ke-5 mengenai pelanjutan dan penambahan program kesejahteraan sosial dan *quick win* ke-7 mengenai keberlanjutan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dimana, untuk memastikan keberhasilan program dan akuntabilitasnya memerlukan data yang berkualitas, dengan melibatkan partisipasi aktif publik untuk memberikan feedback secara berkesinambungan.

3.2.2. Inspirasi dari Filipina



Inspirasi lainnya yang lebih spesifik dapat dilihat dari Komitmen OGP Filipina yang memiliki kemiripan dengan salah satu program unggulan pemerintah ke depan, yaitu “Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil”. Filipina telah menjalankan program tersebut dan dipadukan

¹⁴ Diakses melalui: <https://www.opengovpartnership.org/members/republic-of-korea/commitments/KR0046/>

¹⁵ Diakses melalui: <https://www.opengovpartnership.org/members/united-kingdom/commitments/UK0101/>

¹⁶ Diakses melalui: <https://www.opengovpartnership.org/members/united-states/commitments/US0046/>

dengan komitmen keterbukaan pemerintah melalui Rencana Aksi OGP di tahun 2019-2022, yaitu “***Participatory Children's Health and Nutrition Program***”¹⁷.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, maka akuntabilitas sosial harus menjadi pra syarat dalam implementasinya, di mana publik ikut berpartisipasi aktif mengawasi program ini. Oleh karena itu, dalam menjalankan komitmen ini, Pemerintah Filipina bekerjasama dengan UNICEF, Save the Children, CSO Nasional, dan CSO Lokal untuk memperkuat pelibatan warga penerima manfaat dan publik dalam memberikan masukan secara terus-menerus dan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk penyempurnaan program.

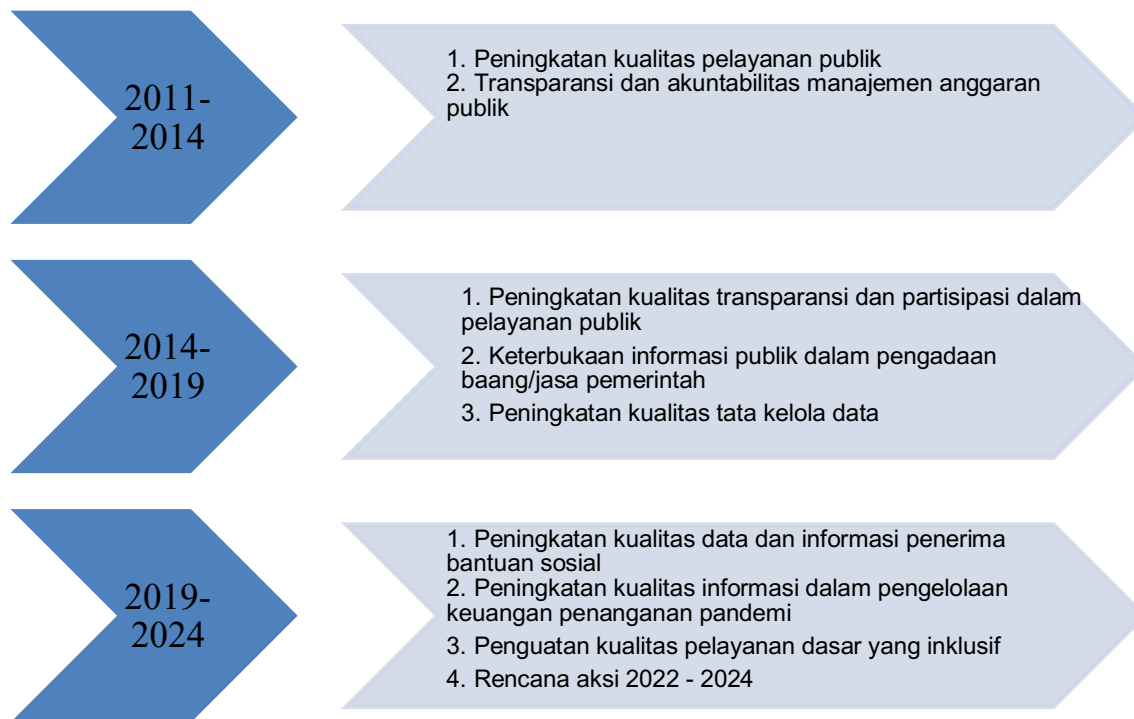
Praktik-praktik baik dari Dalam Negeri dan Luar Negeri, harus menjadi pembelajar bagi Pemerintah Indonesia mendatang. Harapannya, praktik baik tersebut dapat diadopsi dan dikembangkan pada setiap isu dan ranah yang relevan. Hal lain yang tidak dapat dilupakan adalah, peran Indonesia sebagai salah satu inisiator, anggota *Steering Committee*, dan anggota aktif OGP sejak 2012. Artinya, selain menjadikan praktik baik sebagai inspirasi dalam menentukan *benchmark*, Indonesia juga perlu mempromosikan salah satu komponen penting dalam OGP untuk perubahan secara global, yaitu *promoting peer learning across the OGP network*.

4. MELAKSANAKAN OGP BERSAMA ASTA CITA

4.1. Peta Jalan dan Rencana Aksi OGP Indonesia

Di tingkat nasional, pemerintah telah memulai pelaksanaan OGP melalui rencana aksi dan tim pelaksana nasional melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menjadi kerangka regulasi untuk dasar pelaksanaan OGP antara kementerian lembaga dengan lembaga non-pemerintah. Peraturan ini dalam jangkauan pelaksanaannya hanya efektif dalam kerangka pelaksanaan koordinasi dan tidak cukup kuat mengatur hubungan di sektoral isu antara kementerian/lembaga dengan lembaga non-pemerintah.

Gambar 2: Pelaksanaan RAN OGI 2011-2024



Visi Indonesia Emas 2045 mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, salah satunya digerakkan oleh kepemimpinan nasional yang transformatif dan inovatif serta masyarakat sipil yang dinamis, kolaboratif, dan partisipatif.

Visi Indonesia Emas 2045 akan dicapai melalui 8 (delapan) misi, salah satunya ialah Transformasi Tata kelola. Misi ini perlu didukung melalui terciptanya Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia sebagai landasan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Kedua hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai arah dan tujuan pembangunan nasional guna menciptakan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta hukum yang berkeadilan dan demokrasi substansial, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Nilai-nilai *Open Government Partnership* menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Transformasi tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan serta mematuhi kerangka hukum. Dalam melaksanakan Transformasi Tata Kelola, terdapat beberapa isu strategis yang terkait secara langsung dengan Keterbukaan Pemerintah Indonesia yaitu pelayanan publik yang berkualitas, digitalisasi, integritas partai politik, serta relasi pemerintah dan masyarakat sipil. Masing-masing isu strategis tersebut terdapat fokus arah kebijakan yang menjadi sasaran pemerintah.

Arah kebijakan untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu (fisik dan non fisik). Hal ini dilaksanakan melalui pengembangan portal dan/atau platform pelayanan publik nasional serta penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pusat-pusat (*hub*) pelayanan publik. Arah kebijakan transformasi digital pemerintahan difokuskan antara lain pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, serta percepatan penerapan satu data Indonesia.

Arah kebijakan untuk optimalisasi peran partai politik adalah penguatan integritas partai politik melalui penerapan kode etik dan data terkait dana pengurusan partai politik (operasionalisasi), demokrasi internal, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pendanaan negara yang memadai. Selain itu, untuk mewujudkan relasi pemerintah dan masyarakat sipil, arah kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masyarakat sipil melalui penguatan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan dan lingkungan pendukung masyarakat sipil, serta fasilitas penyediaan dana abadi untuk masyarakat sipil.

4.2. Panitia Pelaksana

4.2.1. Regulasi

Sekalipun tidak pernah ada perundang-undangan yang berbunyi secara langsung ‘pemberlakuan nilai-nilai *open government* namun Undang-Undang Republik Indonesia secara prinsip mengadopsi hal tersebut, bahkan sebelum deklarasi OGP.

Tabel 3: Daftar Undang-Undang yang Memuat Nilai-nilai *Open Government*

Undang-Undang	Nilai-Nilai <i>Open Government</i>
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Transparansi, Partisipasi, Inklusif
UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Partisipasi, Inovasi, Inklusif
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024	Transparansi, Partisipasi, Inovasi, Akuntabilitas, Inklusif
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Transparansi, Partisipasi, Inovasi, Akuntabilitas, Inklusif
UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Transparansi, Partisipasi, Inovasi, Akuntabilitas, Inklusif

Undang-Undang	Nilai-Nilai <i>Open Government</i>
UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang diubah sebagian dengan UU No. 15 Tahun 2019.	Transparansi, Partisipasi, Inovasi, Akuntabilitas, Inklusif
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024	Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Inklusif
UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	Transparansi, Partisipasi, Inovasi, Akuntabilitas, Inklusif
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015	Transparansi, Partisipasi, Inovasi, Akuntabilitas, Inklusif
UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Partisipasi, Inklusif
UU No 27 Th 2022 Pelindungan Data Pribadi	Transparansi, Inovasi, Akuntabilitas, Inklusif

Selain Undang-Undang yang disebutkan di atas, sebenarnya masih banyak lagi peraturan perundang-perundangan yang mengandung nilai-nilai *open government*. Contohnya adalah UU Perlindungan Anak yang tegas menyebut partisipasi anak dalam pembangunan, atau UU Kesehatan yang memuat inklusivitas layanan kesehatan. Akan tetapi sekalipun banyak UU telah memiliki nilai *open government*, ini bukan serta merta jaminan bahwa negara tidak melakukan pelanggaran.

Tidak adanya regulasi secara tegas terkait ‘pemberlakuan *open government*’ menjadi faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah-masalah pelanggaran prinsip *open government*. Perubahan UU Desa dapat menjadi sebuah studi kasus menarik. Adanya demonstrasi secara masif, serta lobi para kepala desa, menekan DPR untuk mengubah durasi jabatan karena selama ini suara kepala desa tidak didengar. Kementerian Desa PDTT mengatakan proses yang terjadi telah sesuai dengan prinsip partisipasi. Tapi seberapa jauh partisipasi dapat disebut memenuhi nilai partisipasi? Proses musyawarah dalam sidang DPR ataupun tahapan partisipasi publik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga kerap diragukan keseriusannya. Dalam proses penanganan COVID-19, di mana menyasar kelompok masyarakat rentan, pemerintah baru melibatkan kelompok disabilitas, anak dan kelompok rentan lain setelah diingatkan oleh organisasi masyarakat sipil. Seberapa jauh proses penyusunan kebijakan kabupaten/kota ataupun desa atas masalah perkawinan anak melibatkan remaja perempuan?

Indonesia telah menghasilkan banyak kemajuan dalam implementasi nilai-nilai transparansi, Partisipasi, Inovasi, Akuntabilitas, dan Inklusif. Namun falsafah, mekanisme

dan monitoring pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam kerja-kerja pemerintah perlu diatur dalam kebijakan, termasuk mendorong adanya badan khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan *open government*. Sekretariat yang ada tidak memiliki kewenangan, dan hanya bertugas sebagai koordinatif administratif. Kantor ini keberadaanya pun tidak punya dasar kebijakan selain penunjukan administrasi lingkup Bappenas. Kerja-kerja sekretariat telah sangat baik, tetapi untuk memastikan penerapan *open government* perlu lembaga/badan khusus, atau jika ini disematkan pada kementerian/lembaga yang ada, maka setidaknya perlu kebijakan yang menegaskan tugas pokok serta fungsi serta kewenangan.

4.2.2. Kelembagaan

Indonesia, sebagai anggota aktif Open Government Partnership (OGP), mendukung **komitmen prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan keterbukaan informasi sektor publik**. Komitmen tersebut tercantum dalam deklarasi September 2011, di mana Indonesia termasuk dalam negara perintis. Pernyataan bersama itu meneguhkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB tentang Anti Korupsi, dan instrumen internasional terkait **pemerintahan yang baik dan hak-hak asasi manusia lainnya**.

Sistem Tata Kelola Indonesia tidak menempatkan OGP di bawah kementerian atau lembaga secara khusus, sekalipun sekretariat *Open Government Indonesia* berada di lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pembentukan ini dilakukan pada tahun 2011 bersamaan dengan penyusunan dan pelaksanaan RAN OGI yang pertama.

Sekretariat dibutuhkan untuk memfasilitasi proses kerja bersama, yang sekarang dikenal dengan istilah ko-kreasi, antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. RAN Pertama fokus pada peningkatan layanan publik, perbaikan integritas institusi pelayanan publik, dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik.

Evaluasi RAN Pertama menunjukkan implementasi prinsip-prinsip *open government* masih penuh tantangan, namun baik pemerintah dan kelompok masyarakat sipil menyambut baik komitmen pemerintah pada masa itu. Sebagai bagian dari penggagas, Indonesia wajib menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan nilai-nilai *open government*.

Dalam proses diskusi RAN Kedua, muncul dorongan agar pemerintah secara resmi mengeluarkan penetapan Indonesia sebagai anggota *Open Government Partnership*. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 menjadi satu dari tonggak-tonggak pencapaian demokrasi, di mana menegaskan keseriusan pemerintah akan pelaksanaan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas dan inklusif. RAN Kedua berfokus pada peningkatan layanan dasar publik, perbaikan tata kelola layanan bisnis dan investasi, serta transparansi dan akuntabilitas manajemen anggaran publik. Keputusan presiden tidak menyebut institusi pengampu *Open Government* dan

sekretariat *Open Government Indonesia* meneruskan keberadaanya di lingkup Kementerian PPN/Bappenas

4.2.3. Akuntabilitas

Sekali lagi, OGP dapat menjadi instrumen akselerator program prioritas pemerintah, baik Misi Asta Cita maupun Program *Quick Wins*. Namun, OGP dapat berjalan efektif jika memenuhi sejumlah pra-syarat mendasar. OGP harus ditempatkan dalam kerangka strategi memperkuat demokrasi dan HAM. Pelaksanaan prinsip-prinsip OGP seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi harus ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara. Meminjam konsep transparansi dari Mardiasmi, (2009), keterkaitan transparansi dan hak publik tersebut meliputi:

1. Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (*right to observe*);
2. Hak publik untuk mengakses informasi (*public access to information*);
3. Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan (*right to participate*);
4. Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan kebebasan pers (*free & responsible pers*);
5. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan (*right to appeal*) baik melalui adjudikasi (menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase maupun pengadilan)

Di Indonesia, beberapa pihak telah mencoba menerjemahkan akuntabilitas dan hak publik sebagai 'tanggung gugat'. Prinsip yang menekankan pada aspek tanggung jawab pejabat publik terhadap tindakan yang diambil atas nama publik dan menggunakan sumber daya publik (UNDP, 2014:4). Dengan kata lain, pemerintah mampu menunjukkan tindakan dan keputusannya secara konsisten dengan tujuan yang jelas dan disepakati (Gisselquist, 2018: 8). Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan pemerintah seharusnya merepresentasikan masukan dan keinginan publik (CO-TRAIN-UNDP, 1970: 20).

Di sisi lain, partisipasi dan inklusif menjadi komponen penting dalam tata kelola pemerintahan. Mekanisme demokrasi representatif-berbagi kekuasaan, keterbukaan, dan kemampuan adaptasi dalam mewadahi partisipasi yang bebas, aktif, dan bermakna bagi warga dan pemangku kepentingan agar dapat berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan maupun mendorong dialog kebijakan yang inovatif (UNDP, 2011: 279). Partisipasi menekankan seluruh pihak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara untuk berpendapat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan (Elahi, 2009: 1170).

Sayangnya, potret demokrasi, *civic space* maupun transparansi di Indonesia belum cukup menggembirakan, bahkan cenderung stagnan dan mundur. Meskipun secara nasional Komisi Informasi Pusat (KIP) mencatat skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang mengalami kenaikan sejak 2021 hingga 2023.

Grafis 1: Capaian Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021-2023



(Skor IKIP mengalami kenaikan dari 71,37 pada tahun 2021, menjadi 74,43 pada tahun 2022, dan 75,40 pada tahun 2023)¹⁸

Namun demikian, sejumlah survei dan indeks menunjukkan catatan demokrasi, keterbukaan, dan kondisi ruang sipil yang menurun di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4: Capaian Indeks terkait Demokrasi, Keterbukaan, dan Kondisi Ruang Sipil

Jenis Survei/Indeks	Skor	Keterangan
Survei Keterbukaan Anggaran (Open Budget Survey) Tahun 2023 ¹⁹	Tingkat partisipasi publik (26 dari 100); tingkat pengawasan (56 dari 100);	Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah dalam keterbukaan anggaran publik.

¹⁸ Skor penilaian IKIP yang masuk ke dalam kategori sedang berkisar pada angka 60 sampai 79. Skor IKIP pada kategori baik berada pada rentang angka 80-90 dan skor pada 90-100 menunjukkan keterbukaan informasi publik masuk kategori sangat baik

¹⁹ Diakses melalui: <https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/rankings-charts-OBS-2023.pdf>

Jenis Survei/Indeks	Skor	Keterangan
(Sumber: Indonesia Budget Center/IBC)	dan tingkat transparansi (70 dari 100)	
Indeks Demokrasi Indonesia ²⁰ (Sumber: Varieties of Democracy/V-Dem)	Skor tahun 2023 sebesar 0,43, sementara tahun 2024 sebesar 0,36. Secara ranking Indonesia terjun bebas dari ranking 79 ke 87.	Menunjukkan kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin merosot
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (Sumber: Transparency International)	Skor tahun 2023 sebesar 34 dari 100. Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara.	Stagnasi skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.
Kondisi Ruang Sipil (Sumber: CIVICUS)	Skor pada periode 2017-2022 sebesar 4,6 dari 10	Ruang sipil di Indonesia dikategorikan <i>obstructed</i> atau terhalang dalam aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul dan berserikat, serta mengakses dan berbagi informasi ²¹ .
Survei Indikator Politik Indonesia)	62,9 persen masyarakat merasa semakin takut dalam mengeluarkan pendapat. ²²	

²⁰ Diakses melalui: https://www.v-dem.net/documents/43/v-dem_dr2024_lowres.pdf, dengan klasifikasi penilaian untuk publik dan pengawasan: 0-40 Weak, 41-60 Limited, 61-100 Adequate. Sedangkan untuk skor klasifikasi pada transparansi: 0-20 No information available, 21-40 Minimal information available, 41-60 Insufficient, 61-80 Substantial information available, 81-100 Extensive information available.

²¹ CIVICUS et al. Civic space in indonesia Summary of joint submission to the UN Universal Periodic Review (2017-2022)

²² Moh. Khory Alfarizi, "Survei Indikator Politik Indonesia: 62,9 Persen Rakyat Semakin Takut Berpendapat", Tempo, 9 April 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1580168/survei-indikator-politik-indonesia-629-persen-rakyat-semakin-takut-berpendapat> (diakses pada 22 Januari 2022).

4.2.4. Pendanaan Sekretariat dan Rencana Aksi

Pendanaan sekretariat dan RAN OGP Indonesia merupakan tanggung jawab Negara sebagai pemenuhan komitmen negara sebagai anggota dan perintis inisiatif OGP. Bentuk pendanaan tersebut, dalam kerangka implementasi rencana aksi, terbagi dalam dua besaran:

1. Pendanaan kerja-kerja kementerian/lembaga pemerintah dalam pelaksanaan RAN OGI
2. Pendanaan kerja-kerja masyarakat sipil sebagai mitra implementasi RAN OGI

Pendanaan kerja-kerja pemerintah dalam pelaksanaan RAN OGI seharusnya tercermin dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sebagai bentuk kepemilikan dan akuntabilitas anggaran. Ini tidak terbatas pada program, tetapi juga termasuk pembiayaan kebutuhan keberadaan unit/sekretariat OGP Indonesia, serta proses pemantauan dan evaluasi. Salah satu verifikasi apakah ko-kreasi berjalan baik di sisi pemerintah adalah adanya program RAN OGP dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga (Rencana Strategi dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Untuk pendanaan pemantauan dan evaluasi masuk dalam anggaran operasional kantor staf presiden, atau yang setara, sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan RAN OGI berjalan berkualitas sesuai komitmen negara.

Pendanaan implementasi RAN OGI dari sisi aktor nonpemerintah seyogyanya menjadi bagian dari kemandirian OMS. OMS menjalankan fungsi sebagai mitra bicara, bertukar pikiran dan keahlian dalam implementasi RAN OGI, sementara implementasi induk menjadi bagian dari pendanaan pemerintah melalui perencanaan penganggaran yang sudah diulas di atas. Pendanaan untuk implementasi RAN OGI kepada organisasi nonpemerintah terbatas pada pelaksanaan program atau komitmen, bukan atas lembaga masyarakat sipil. Dalam kerangka kemandirian, OMS tetap harus mandiri mendanai lembaganya, namun terbuka mendapatkan dana pemerintah untuk menjalankan implementasi ko-kreasi.

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Setnas OGI) sebagai lembaga pembantu koordinasi sudah sepatutnya mendapatkan pendanaan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Sejauh ini pendanaan Setnas OGI dan RAN OGI lebih kepada operasional menjalankan program. Hal ini perlu ditingkatkan menjadi pendanaan berbasis kelembagaan.

Sumber pendanaan Setnas OGI dan RAN OGI berasal dari APBN melalui Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga ataupun bantuan pendanaan kerjasama pembangunan dari donor, baik yang dikelola oleh Setnas OGI, maupun dana donor yang disalurkan melalui OMS.

Pada awal *Open Government Indonesia* dibentuk, pendanaan sangat mendukung advokasi koalisi dan kerjasama pemerintah dan OMS. Sebagian OMS dapat terus

mengadvokasi open government karena menjadi bagian dari bidang atau isu utamanya. Sementara, Sebagian OMS lain tidak konsisten mengadvokasikan open government karena harus mengutamakan isu/bidang lain. .

Keberadaan Setnas OGI pada Bappenas menjadi bagian penting dari upaya mengatasi tantangan pendanaan. Advokasi *open government* dapat terus dilakukan meski mengalami kekurangan atau kekosongan pendanaan dari donor internasional. Bappenas sebagai salah satu lembaga negara yang penting dan terus ada, bukan hanya membuat keberadaan Setnas OGI tetap ada, tetapi juga memastikan terus terjalannya forum bersama antara pemerintah dan OMS yang memungkinkan adanya alokasi pendanaan negara yang optimal bagi keberlangsungan dan masa depan *open government* di Indonesia. Oleh karenanya, penting kedepannya untuk mengupayakan pelibatan aktor non-pemerintah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Setnas OGI baik dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

5. Rekomendasi Kritis

Berangkat dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Hal utama yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Pencapaian Visi dan Misi Presiden Terpilih Prabowo - Gibran perlu diikuti dengan penerapan prinsip-prinsip Keterbukaan Pemerintah sebagai akselerator, serta menjamin agar setiap capaiannya tepat sasaran. Selain itu, terdapat beberapa hal lainnya yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Indonesia sebagai salah satu inisiator dan negara anggota OGP pada dasarnya telah menerapkan inisiatif Keterbukaan Pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional yang disusun setiap dua tahun. Akan tetapi, konsep Keterbukaan Pemerintah belum menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
2. Tanpa adanya penerapan Keterbukaan Pemerintah, pelaksanaan program pemerintah beresiko mengalami “kebocoran” akibat tata kelola yang tidak transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Indonesia pada dasarnya sudah memiliki pengalaman dan pembelajaran baik melalui pelaksanaan dan pencapaian sejumlah rencana aksi keterbukaan pemerintah yang sejalan dengan visi-misi presiden terpilih.
3. Berbagai inspirasi Keterbukaan Pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri, mempertegas bahwa transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusi tidak menghambat negara-negara OGP untuk berkembang. Sebaliknya, inisiatif Keterbukaan Pemerintah justru menjadi inspirasi bagi negara-negara dunia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi warganya, mulai dari isu kesejahteraan sosial, kebijakan publik, kesehatan, dll.

4. Meski sudah berjalan sejak 2011, inisiatif Keterbukaan Pemerintah di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar dapat secara efektif berkontribusi terhadap tercapainya visi-misi presiden terpilih. Adapun kekurangan yang dimaksud antara lain adalah: tidak adanya regulasi payung yang bersifat otoritatif, struktur dan tata kelola dalam pelaksanaan Keterbukaan Pemerintah di Indonesia yang belum ajeg, minimnya akuntabilitas dalam pelaksanaan aksi, belum meratanya paradigma keterbukaan pemerintah (termasuk dari sisi masyarakat sipil), dan ketidakjelasan pendanaan.

Oleh karena itu, dokumen ini menyajikan rekomendasi yang terbagi dalam tiga aspek utama pelaksanaan OGP di Indonesia yang dapat membantu akselerasi capaian 8 Asta Cita dan *Quick Wins* (program cepat dan baik) Prabowo-Gibran. Adapun, rekomendasi tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 5: Rekomendasi Kritis

Aspek regulasi	1. Mengarusutamakan prinsip-prinsip Keterbukaan Pemerintah di setiap lini dan level pemerintahan melalui pengesahan Rancangan Perpres Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia sebagai regulasi payung keikutsertaan Indonesia dalam OGP, sekaligus menjadi dokumen rujukan dalam perencanaan dan implementasi inisiatif Keterbukaan Pemerintah oleh setiap lembaga pemerintahan. 2. Mendorong revisi undang-undang yang memiliki muatan OGP seperti UU KIP, UU Pelayanan Publik, dan UU Administrasi Pemerintahan agar selaras dengan prinsip-prinsip Keterbukaan Pemerintah.
Aspek kelembagaan	1. Menetapkan struktur kelembagaan untuk menjalankan perencanaan, implementasi, serta evaluasi Keterbukaan Pemerintah Indonesia, yang meliputi organ-organ seperti: Dewan Pengarah, Pelaksana Aksi, Sekretariat Pemerintah, Sekretariat non-pemerintah, dll. 2. Memastikan adanya organ atau unit yang berperan sebagai koordinator Keterbukaan Pemerintah Indonesia, sehingga fungsi koordinasi, baik antar aktor pemerintah maupun non-pemerintah, dapat berjalan efektif. 3. Mengintegrasikan inisiatif keterbukaan pemerintah yang dijalankan oleh cabang kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan

	yudikatif agar dapat pemantauan dan evaluasinya dapat berjalan secara holistik. 4. Melakukan penyelarasan antara Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia dengan RPJMN, Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L/D untuk mendorong pelaksanaan komitmen serta memastikan ketersediaan pendanaan dan dukungan sumber dayanya (sdm, sarana/prasarana/teknologi informasi, dll). 5. Melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan untuk dapat mendukung komitmen Keterbukaan Pemerintah yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan pemerintah, namun dianggap penting dan berdampak positif bagi Indonesia. 6. Mendorong skema pendanaan melalui perwujudan Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil/Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat sipil dan memperluas kemitraan OGP di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Skema pendanaan ini termuat dalam Asta Cita ke-4 Prabowo-Gibran.
Aspek akuntabilitas	1. Mengarusutamakan ko-kreasi di setiap lini dan level pemerintahan untuk mendorong proses pengambilan kebijakan yang terbuka, partisipatif, dan tepat sasaran. 2. Mendorong transparansi melalui kebijakan keterbukaan informasi dan data yang didukung dengan peningkatan aksesibilitas, interoperabilitas, dan bagi-pakai data, serta diseminasi secara berkala terhadap informasi yang dibutuhkan oleh publik. 3. Mendorong partisipasi bermakna dalam pengambilan kebijakan/perumusan peraturan dengan melibatkan aktor-aktor non pemerintah yang relevan. 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara reguler dan partisipatif terhadap proses, maupun terhadap hasil dan dampak dari setiap pelaksanaan inisiatif Keterbukaan Pemerintah, baik melalui Multi-stakeholder Forum, ataupun metode lainnya. 5. Memasukkan indikator nilai-nilai OGP dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan sistem penilaian kinerja ASN.